



Strategi Komunikasi BP3MI dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Hak-hak Pekerja Migran Indonesia

Beatania Jelina Ngamung¹, *Alponia Kartini Nurhayati², Yunita Huberta Siska Henukh³, Fransiskus Maurice Riberu⁴, Lasarus Jehamat⁵, Imelda Nahak⁶, Helga Maria E. Gero⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Nusa Cendana Kupang

E-Mail: beataniajelinangamung@gmail.com¹, nurhayatirini683@gmail.com², fransriberu563@gmail.com³, siskahenukh23@gmail.com⁴, jehamat.lasarus@yahoo.co.id⁵, imelda.nahak@staf.undana.ac.id⁶, helgagero@gmail.com⁷

Abstract

Indonesian Migrant Workers constitute a labor group that makes a significant contribution to the national economy through remittances, particularly from regions with high migration intensity such as East Nusa Tenggara Province; however, the strong public interest in working abroad is often not accompanied by adequate understanding of safe migration procedures, protection mechanisms, and the rights and obligations of migrant workers. This condition has led to serious problems, including the increasing number of non-procedural migrant workers, deportation cases, and vulnerability to human trafficking crimes, indicating an information and communication gap between migrant worker protection institutions and prospective migrant workers. This study aims to analyze the communication strategies implemented by the Indonesian Migrant Workers Protection Service Center of East Nusa Tenggara Province in enhancing public awareness of migrant workers' rights. A qualitative approach with a descriptive method was employed to provide an in-depth portrayal of the communication practices carried out by the institution, with data collected through in-depth interviews, observation of socialization activities, and documentation studies. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, while the conceptual analytical framework was based on the Shannon–Weaver Two-Way Communication Model to assess message delivery effectiveness, communication channels, message recipients, and feedback mechanisms. The findings indicate that the Indonesian Migrant Workers Protection Service Center of East Nusa Tenggara Province has implemented various communication strategies, including direct community outreach, pre-departure orientation, the use of visual and audio media, and cross-sector collaboration with local governments and community leaders. Although these strategies contribute to increasing public knowledge regarding migration procedures and migrant workers' rights, their effectiveness remains constrained by low literacy levels, challenging geographical conditions, and weak feedback mechanisms from target communities. The study concludes that strengthening dialogic and participatory communication, simplifying messages to improve comprehensibility, and adapting communication media to local cultural contexts are essential for improving migrant worker protection. The novelty of this study lies in integrating a two-way communication model with the socio-cultural context of East Nusa

Tenggara as a basis for formulating more contextual, adaptive, and community-empowering communication strategies for migrant worker protection.

Keywords: *Communication; Migration; Protection.*

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia merupakan kelompok tenaga kerja yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi, khususnya dari daerah dengan tingkat migrasi tinggi seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri sering kali tidak diimbangi oleh pemahaman yang memadai mengenai prosedur migrasi yang aman, mekanisme perlindungan, serta hak dan kewajiban pekerja migran. Kondisi tersebut memunculkan berbagai permasalahan serius, seperti meningkatnya jumlah pekerja migran nonprosedural, kasus deportasi, serta kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang, yang menunjukkan adanya kesenjangan informasi dan komunikasi antara lembaga pelindung pekerja migran dan masyarakat calon pekerja migran. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak pekerja migran. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam praktik komunikasi yang dijalankan oleh BP3MI, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan sosialisasi, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sementara kerangka analisis konseptual mengacu pada Model Komunikasi Dua Arah Shannon–Weaver guna menilai efektivitas penyampaian pesan, saluran komunikasi, penerima pesan, serta mekanisme umpan balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Provinsi NTT telah menerapkan berbagai strategi komunikasi, antara lain sosialisasi langsung ke masyarakat, orientasi pra-pemberangkatan, pemanfaatan media visual dan audio, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Meskipun strategi tersebut berkontribusi pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan hak pekerja migran, efektivitas komunikasi masih menghadapi hambatan berupa rendahnya tingkat literasi, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta lemahnya umpan balik dari masyarakat sasaran. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peningkatan perlindungan pekerja migran membutuhkan penguatan komunikasi dialogis yang partisipatif, penyederhanaan pesan agar lebih mudah dipahami, serta penyesuaian media komunikasi berbasis budaya lokal. Kebaruan karya ilmiah ini terletak pada pengintegrasian model komunikasi dua arah dengan konteks sosial budaya Nusa Tenggara Timur sebagai dasar perumusan strategi komunikasi perlindungan pekerja migran yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat calon pekerja migran.

Kata-kata Kunci: Komunikasi; Migran; Perlindungan.

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, terutama ditandai oleh tingginya angka pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja yang layak di dalam negeri. Situasi ini mendorong banyak warga untuk mencari penghidupan melalui kerja migran ke luar negeri, yang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga migrasi tenaga kerja internasional menjadi salah

satu strategi utama keluarga dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini bukan hanya terjadi di pusat-pusat urban, tetapi juga di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga migrasi menjadi pilihan bagi banyak masyarakat untuk mengatasi keterbatasan ekonomi yang terus berlangsung. Mangara, Saputri, dan Putri menyatakan bahwa permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia yang belum mampu menyerap tenaga kerja produktif secara merata menjadikan migrasi tenaga kerja menjadi fenomena yang sangat penting untuk dikaji secara ilmiah agar implikasinya terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak pekerja dapat dipahami dan diatasi secara sistematis.¹ Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya penelitian yang menjelaskan faktor-faktor struktural yang menyebabkan masyarakat terdorong ke luar negeri untuk mencari kerja, serta bagaimana negara memitigasi dampak negatifnya melalui kebijakan dan strategi komunikasi yang tepat.

Provinsi NTT dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia dengan berbagai permasalahan migrasi yang serius seperti migrasi nonprosedural (ilegal), angka kematian pekerja, serta kasus eksploitasi yang terus terjadi. Misalnya, data menunjukkan bahwa antara Januari dan April 2025, 49 pekerja migran asal NTT dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, mayoritas karena keberangkatan secara nonprosedural yang rentan terhadap keadaan kerja yang tidak aman dan pelanggaran hak asasi pekerja.² Berita resmi juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 BP3MI NTT memfasilitasi pemulangan jenazah PMI yang berangkat secara ilegal, serta terus melakukan upaya edukasi bagi calon PMI untuk berangkat secara prosedural guna mengurangi angka kematian dan kasus deportasi yang semakin tinggi.³ Permasalahan ini juga diperkuat oleh laporan dari media nasional yang mencatat puluhan pekerja migran asal NTT meninggal di luar negeri selama tahun 2024, yang sebagian besar berangkat melalui saluran nonprosedural.⁴ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa masalah migrasi tenaga kerja di

¹ Togi Haidat Mangara, Wadi Saputri, dan Rahmi Aulia Putri, "The Effect of Social, Economic, and Employment Conditions on Overseas Migration in Indonesia," *Benefits: Journal of Economics and Tourism* 1, no. 1 (2024): 16–32, <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Benefits-JET/article/view/9>.

² Imam Hamdi, "49 migrant workers from NTT return deceased between January and April 2025," *APSN: Asia Pacific Solidarity Network*, last modified 2025, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-04-28/49-migrant-workers-ntt-return-deceased-between-january-and-april-2025.html>.

³ Yoseph Boli Bataona, "BP3MI NTT Minta Calon Pekerja Migran Berangkat secara Prosedural," *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*, last modified 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5208033/bp3mi-ntt-minta-calon-pekerja-migran-berangkat-secara-prosedural>.

⁴ Sigiranus Marutho Bere dan Glori K. Wadrianto, "2024, Ada 122 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri," *Kompas.com*, last modified 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/12/16/223325878/2024-ada-122-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri>.

NTT bukan sekadar isu numerik, tetapi telah menjadi persoalan hak asasi manusia dan keselamatan yang memerlukan perhatian akademik dan kebijakan yang serius.

Persoalan migrasi nonprosedural ini tidak hanya berdampak pada tingkat kematian, tetapi juga meningkatkan kerentanan pekerja terhadap eksploitasi, perdagangan orang, serta hilangnya hak upah dan kondisi kerja yang layak di negara tujuan. Data nasional bahkan menunjukkan bahwa puluhan juta pekerja Indonesia bekerja tanpa dokumen legal, yang membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak pekerja serta perdagangan manusia.⁵ Fenomena ini diperparah oleh modus perekrutan melalui jalur informal seperti jalur tikus dan proses keberangkatan yang tidak melewati prosedur resmi, sebagaimana ditemukan dalam kasus 155 calon PMI yang hendak bekerja di Malaysia tanpa paspor dan melalui rute ilegal.⁶ Tingginya angka PMI ilegal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi hukum dan akses informasi prosedur migrasi aman di kalangan masyarakat asal NTT, yang pada gilirannya memperkuat pentingnya penelitian yang mengevaluasi bagaimana strategi komunikasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak PMI.

Peran institusi pemerintah, khususnya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI), amat penting dalam upaya memberikan perlindungan, pelayanan, serta edukasi kepada calon PMI. BP3MI tidak hanya bertanggung jawab atas fasilitasi keberangkatan legal dan pemulangan PMI bermasalah, tetapi juga memiliki program sosialisasi dan penyuluhan tentang migrasi aman dan hak-hak pekerja migran. Misalnya, BP3MI bersama pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencegah migrasi nonprosedural melalui kegiatan bersama pada Hari Buruh Migran Internasional 2025, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi di masyarakat.⁷ Selain itu, BP3MI dan KP2MI juga memperkuat peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dan sosialisasi edukasi informasi ketenagakerjaan demi memperluas akses peluang

⁵ Primayanti, "Indonesia Expands Measures to Protect Migrant Workers Abroad," *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*, last modified 2025, <https://en.antaranews.com/news/395710/indonesia-expands-measures-to-protect-migrant-workers-abroad>.

⁶ Humas, "Berangkat Ilegal Melalui Jalur Laut, KemenP2MI Selamatkan 155 Calon Pekerja Migran Indonesia di Nunukan," *Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, last modified 2025, <https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/berangkat-ilegal-melalui-jalur-laut-kemenp2mi-selamatkan-155-calon-pekerja-migran-indonesia-di-nunukan>.

⁷ Yoseph Boli Bataona, "BP3MI NTT Memperkuat Kolaborasi Cegah Pekerja Migran Ilegal," *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*, last modified 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5312113/bp3mi-ntt-memperkuat-kolaborasi-cegah-pekerja-migran-ilegal>.

kerja berbasis prosedural bagi lulusan sekolah kejuruan di Kupang.⁸ Upaya ini menunjukkan bahwa strategi penyampaian informasi merupakan komponen penting dalam mengatasi tantangan migrasi ilegal, terutama bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan literasi hukum, akses informasi, serta kemampuan komunikasi masyarakat yang menjadi calon PMI.

Beragam studi sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek tantangan yang dihadapi PMI serta pentingnya komunikasi efektif dalam konteks migrasi tenaga kerja. Penelitian Kaha, Lawalu, dan Matta menunjukkan bahwa edukasi masyarakat serta kolaborasi lintas lembaga menjadi instrumen penting dalam upaya mitigasi migrasi nonprosedural.⁹ Penelitian Keke et al. juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk mendukung pekerja migran agar dapat berinteraksi secara produktif dan aman dalam konteks lintas budaya dan bahasa, terutama ketika menghadapi hambatan komunikasi di negara penempatan.¹⁰ Selain itu, penelitian Djatmika et al. menunjukkan bahwa kemampuan memahami kode budaya dan bahasa negara tujuan memainkan peran sentral dalam integrasi dan keselamatan pekerja migran.¹¹ Meski demikian, masih terdapat celah riset yang jelas dalam kajian ilmiah di konteks strategi komunikasi lembaga pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak PMI, khususnya di daerah asal besar seperti NTT, yang belum banyak ditangani secara komprehensif.

Penelitian Syahputra dan Kholil memperlihatkan bahwa model komunikasi seperti Shannon–Weaver dapat menjadi kerangka analisis yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi pemerintah, karena model ini mencakup aspek sumber informasi, transmisi pesan, saluran komunikasi, penerima, serta potensi gangguan (noise) yang dapat menghambat penyampaian pesan secara efektif.¹² Model ini dianggap relevan

⁸ Humas/BP3MI NTT, “KP2MI dan BP3MI NTT Perkuat Peran Bursa Kerja Khusus Lewat Sosialisasi di Kupang,” *Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, last modified 2025, <https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/kp2mi-dan-bp3mi-ntt-perkuat-peran-bursa-kerja-khusus-lewat-sosialisasi-di-kupang>.

⁹ Hendrikus Likusina Kaha, Stephanie Perdana Ayu Lawalu, dan Rian Petrus Pati Matta, “Strategi BP3MI dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Provinsi NTT,” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 3 (2025): 285–304, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/20127>.

¹⁰ Yulianti Keke et al., “Effective Communications for Indonesian Migrant Workers in Malaysia,” *IJCCH: International Journal of Community Care of Humanity* 2, no. 4 (2024): 431–438, <https://journal.lsmsharing.com/index.php/ijcch/article/view/173>.

¹¹ Djatmika et al., “Intercultural Communicative Competence among Indonesian Migrant Workers in Malaysia: a Qualitative Exploration,” *Frontiers in Sociology* 9, no. 3 (2024): 1–14, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11004264/>.

¹² Romi Syahputra dan Syukur Kholil, “Application of the Shannon and Weaver Model to Reduce Message Distortion in Securing the 2024 Deli Serdang Election,” *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 2126–2136, <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/4593>.

untuk mengevaluasi bagaimana pesan mengenai prosedur migrasi aman dan hak pekerja disampaikan kepada masyarakat target, serta bagaimana hambatan informasi dapat berdampak pada pemahaman masyarakat yang masih rendah akan prosedur legal. Adopsi model komunikasi semacam ini dalam penelitian sebelumnya belum banyak dieksplorasi secara mendalam di konteks migrasi pekerja Indonesia, sehingga memberikan ruang bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi empiris yang kuat terhadap literatur komunikasi dan kebijakan migrasi.

Analisis akademik juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam konteks migrasi pekerja perlu didukung oleh pemahaman yang lebih dalam tentang hambatan serta preferensi media yang efektif untuk sasaran masyarakat tertentu, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses informasi terbatas. Hal ini menegaskan urgensi penelitian yang tidak hanya menggambarkan fenomena migrasi ilegal, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pesan, saluran komunikasi, serta persepsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh lembaga pemerintah seperti BP3MI. Dengan pemahaman ini, penelitian dapat mengidentifikasi strategi mana yang lebih berhasil dalam mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku calon PMI menuju proses migrasi yang aman dan prosedural.

Berdasarkan rangkaian masalah dan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjawab pertanyaan penelitian utama yang menjadi fokus studi ini. Pertama, bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan oleh BP3MI Provinsi NTT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan prosedur migrasi PMI? Pertanyaan ini perlu dijawab untuk mengetahui apakah cara penyampaian informasi telah efektif atau justru mengalami hambatan yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat. Kedua, sejauh mana penerapan Model Komunikasi Shannon–Weaver dapat menjelaskan dinamika komunikasi pesan migrasi aman antara BP3MI sebagai sumber informasi dan calon PMI sebagai penerima pesan? Pertanyaan kedua ini membuka ruang untuk memahami bagaimana komponen komunikasi bekerja secara sistemik dalam konteks migrasi pekerja. Ketiga, apa saja faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam komunikasi publik terkait migrasi aman di masyarakat NTT, serta bagaimana strategi tersebut dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan perlindungan PMI? Perumusan masalah ini diharapkan dapat memandu penelitian sehingga memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan strategi komunikasi pemerintah dalam konteks migrasi tenaga kerja internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sebagai kerangka utama untuk memahami fenomena strategi komunikasi yang diterapkan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, serta dinamika komunikasi yang berlangsung antara lembaga pemerintah dan masyarakat sasaran secara mendalam dan kontekstual, sebagaimana ditegaskan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman realitas sosial dari sudut pandang subjek penelitian.¹³ Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai bentuk pesan, media komunikasi, serta respons masyarakat terhadap strategi sosialisasi BP3MI tanpa melakukan intervensi atau manipulasi variabel, sesuai pandangan Bungin tentang penelitian sosial deskriptif.¹⁴ Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap fenomena komunikasi sebagaimana terjadi secara alami di lapangan. Dengan demikian, metode yang digunakan relevan untuk menjelaskan efektivitas sekaligus kendala strategi komunikasi perlindungan PMI.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpusat di Kota Kupang karena wilayah ini merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar dengan tingkat permasalahan migrasi nonprosedural yang tinggi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa BP3MI NTT memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan sosialisasi, orientasi pra-pemberangkatan, serta edukasi hak-hak PMI kepada masyarakat. Keberadaan berbagai program komunikasi publik dan kerja sama lintas sektor menjadikan lokasi ini relevan untuk mengamati secara langsung praktik komunikasi institusional pemerintah. Lingkungan penelitian yang aktif secara programatik memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual. Kondisi tersebut mendukung pencapaian tujuan penelitian secara optimal.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam strategi komunikasi BP3MI. Informan penelitian mencakup pejabat struktural dan staf BP3MI yang menangani sosialisasi dan orientasi pra-pemberangkatan, serta calon PMI dan PMI yang pernah mengikuti program BP3MI. Pemilihan informan secara purposif bertujuan memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian, sebagaimana

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).

¹⁴ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

dijelaskan oleh Sugiyono terkait teknik pemilihan informan berbasis tujuan penelitian.¹⁵ Keterlibatan dua kelompok informan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh sudut pandang yang seimbang antara pihak penyampai dan penerima pesan. Pendekatan ini memperkuat kedalaman dan keakuratan data kualitatif yang dikumpulkan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan orientasi pra-pemberangkatan yang dilaksanakan BP3MI, sehingga peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, serta praktik komunikasi secara nyata. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi BP3MI dan BP2MI, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan PMI, laporan statistik, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut mengikuti prinsip fleksibilitas penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan Creswell mengenai pentingnya kombinasi sumber data untuk memperkaya temuan.¹⁶ Integrasi data primer dan sekunder bertujuan memperkuat validitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁷ Proses reduksi dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data sesuai tujuan penelitian, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola komunikasi yang ditemukan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka Model Komunikasi Shannon–Weaver sebagai dasar analisis teoritis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, sebagaimana disarankan oleh Sutopo terkait validitas penelitian kualitatif.¹⁸ Penerapan prosedur ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (UK: SAGE Publications, 1994).

¹⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Edisi 2. (Surakarta: Univ. Sebelas Maret, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi komunikasi oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki bentuk dan implementasi yang beragam untuk meningkatkan kesadaran hak-hak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama melalui sosialisasi aktif kepada masyarakat di daerah-daerah kantong migrasi. Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa BP3MI secara terjadwal melakukan kegiatan sosialisasi langsung ke desa-desa, penyelenggaraan orientasi pra-pemberangkatan (OPP), pemanfaatan media visual dan audio, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk menjangkau khalayak yang luas. Sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan pesan penting tentang prosedur migrasi legal, hak dasar PMI, risiko migrasi ilegal, serta mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga masyarakat calon PMI memiliki informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Meski pesan yang disampaikan cukup komprehensif secara konten, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat sasaran atas isi informasi masih bervariasi, terutama dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan serta keterbatasan akses terhadap media komunikasi formal. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa meskipun BP3MI telah mengimplementasikan berbagai strategi komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap pesan tersebut belum sepenuhnya optimal sesuai tujuan awal penyuluhan.

Data juga menunjukkan adanya hambatan struktural yang signifikan dalam proses komunikasi antara BP3MI dan masyarakat calon PMI, terutama munculnya fenomena noise atau gangguan komunikasi yang menghambat penerimaan pesan. Faktor utama yang menjadi hambatan adalah rendahnya tingkat literasi hukum dan informasi di kalangan masyarakat, yang membuat banyak anggota masyarakat kurang mampu memahami berbagai istilah teknis dan prosedural yang disampaikan oleh petugas komunikasi. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa formal dan istilah teknis sering kali tidak sepenuhnya dipahami, yang menyebabkan pesan yang disampaikan hanya dipahami secara parsial atau bahkan salah tafsir oleh sebagian masyarakat. Hambatan geografis juga menjadi faktor penting yang memperlemah efektivitas komunikasi, di mana daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur yang sulit dijangkau menyebabkan sosialisasi tidak tersebar merata dan berlangsung sporadis, sehingga pesan tidak selalu sampai pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Keadaan ini semakin memperjelas bahwa kendala eksternal seperti jaringan transportasi,

distribusi informasi yang tidak merata, serta keterbatasan teknologi informasi turut menghambat proses komunikasi institusional.

Temuan wawancara mendalam dengan calon PMI dan PMI yang telah mengikuti program menunjukkan bahwa meskipun mereka mengetahui keberadaan BP3MI sebagai institusi pelindungan, tingkat pemahaman mereka terhadap hak-hak normatif serta mekanisme pelaporan kasus masih sangat terbatas. Dari responden yang diwawancarai, hanya sebagian kecil yang mampu menyebutkan hak-hak dasar yang dimiliki PMI sesuai peraturan pemerintah, sedangkan mayoritas responden lebih familiar dengan risiko migrasi ilegal dan sanksi administratifnya. Situasi ini mencerminkan bahwa pesan yang dominan tertangkap oleh masyarakat lebih bersifat preventif dan regulatif daripada informatif dan pemberdayaan, sehingga belum mampu membentuk kesadaran kritis terhadap hak-hak normatif PMI yang melekat secara konstitusional. Data ini menunjukkan adanya gap antara tujuan strategi komunikasi yang ditetapkan BP3MI dengan hasil nyata pemahaman masyarakat, yang terlihat dari hasil wawancara di lapangan. Kesimpulan awal dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun strategi komunikasi telah dijalankan, keberhasilan penyampaian dan pemahaman pesan masih menghadapi tantangan besar.

Selain itu, hasil observasi pada sesi orientasi pra-pemberangkatan mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjadi cenderung bersifat satu arah, dengan ruang dialog yang relatif terbatas bagi peserta untuk memberikan umpan balik atau bertanya secara bebas. Petugas BP3MI seringkali memfokuskan penyampaian materi sesuai standar operasional prosedur, tanpa banyak menyesuaikan dengan respons atau kebutuhan spesifik peserta, meskipun ada sesi tanya jawab singkat yang disediakan. Minimnya umpan balik dari peserta membuat BP3MI sulit untuk mengevaluasi sejauh mana pesan yang disampaikan benar-benar dipahami, sehingga ada potensi pesan tidak dipahami sebagaimana mestinya oleh khalayak sasaran. Kondisi ini diperkuat oleh responden yang menyatakan bahwa kesempatan untuk bertanya kerap terasa terbatas karena merasa sungkan atau kurang percaya diri, apalagi di antara peserta yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi yang berjalan masih belum sepenuhnya memadai untuk memastikan pesan tersampaikan dan dipahami secara efektif oleh masyarakat calon PMI.

Temuan lain yang signifikan adalah bahwa faktor eksternal seperti peran aktor informal seperti calo migrasi atau jaringan nonresmi sering kali menjadi sumber informasi yang lebih mudah diterima masyarakat karena lebih dekat, personal, dan kadang menawarkan janji-janji pekerjaan yang menjanjikan tanpa prosedur resmi. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun BP3MI berusaha melakukan sosialisasi resmi, aktor informal tetap memiliki pengaruh besar dalam proses pemaknaan informasi oleh masyarakat karena mereka lebih sering diakses oleh calon PMI di lapangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pesan formal yang disampaikan BP3MI masih kalah bersaing dengan pesan informal yang sering kali disebar melalui jaringan pribadi atau komunitas yang lebih mudah diterima masyarakat tertentu. Situasi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi komunikasi formal institusional dan praktik komunikasi informal yang beredar di masyarakat, sehingga pesan perlindungan institusi sering kali mendapat tantangan serius dari pesan informal yang tidak akurat atau menyesatkan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah komunikasi publik dalam konteks perlindungan PMI lebih kompleks daripada sekadar penyampaian pesan, karena melibatkan konteks sosial, budaya, dan struktural masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini perlu diposisikan pada kerangka teori komunikasi sosial dan komunikasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya peran institusi negara sebagai komunikator utama. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi publik oleh lembaga pemerintah berfungsi strategis untuk meningkatkan literasi kebijakan dan kesadaran hak warga negara, termasuk pekerja migran. Studi yang dilakukan oleh Hapiipi menegaskan bahwa efektivitas komunikasi lembaga perlindungan pekerja migran sangat ditentukan oleh kejelasan pesan, kesesuaian media, serta kemampuan lembaga membaca karakteristik sosial masyarakat sasaran.¹⁹ Temuan ini relevan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI NTT telah memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat, tetapi masih menghadapi keterbatasan pada aspek pemahaman masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara otoritas institusi dan efektivitas pemaknaan pesan masih menjadi persoalan utama.

Literatur lain menegaskan bahwa komunikasi perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya bersifat informatif, melainkan harus bersifat edukatif dan dialogis agar masyarakat mampu memahami hak normatif secara utuh. Penelitian Narendra et al. mengungkapkan bahwa program pemberdayaan PMI oleh BP3MI sering kali terhambat oleh rendahnya literasi hukum dan komunikasi satu arah yang dominan.²⁰ Temuan penelitian ini

¹⁹ Muhamad Hapiipi, "Optimalisasi Humas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Human Trafficking," *JRMK: Jurnal Riset Manajemen Komunikasi* 5, no. 1 (2025): 37–46, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRMK/article/view/5890>.

²⁰ Delvian Narendra et al., "Pemberdayaan Pekerja Migran: Peran BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

memperkuat hasil lapangan bahwa masyarakat lebih mengingat risiko migrasi ilegal dibandingkan hak perlindungan yang seharusnya melekat pada PMI. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan fokus pesan yang disampaikan oleh institusi. Kekosongan inilah yang menjelaskan mengapa kesadaran hak PMI belum berkembang secara optimal.

Dari perspektif komunikasi kebijakan publik, berbagai penelitian menyatakan bahwa pendekatan top-down masih menjadi pola dominan dalam sosialisasi kebijakan di Indonesia. Studi yang dilakukan Kaha, Lawalu, dan Matta menjelaskan bahwa pola komunikasi satu arah cenderung mengabaikan kebutuhan dialog dan partisipasi masyarakat, sehingga pesan kebijakan tidak sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran.²¹ Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan bahwa kegiatan sosialisasi BP3MI masih berfokus pada penyampaian materi tanpa evaluasi mendalam atas pemahaman peserta. Minimnya ruang umpan balik menyebabkan institusi sulit menyesuaikan pesan dengan kondisi sosial lokal. Kesenjangan ini menandakan lemahnya integrasi model komunikasi dua arah dalam praktik lapangan.

Hambatan komunikasi yang muncul juga berkaitan erat dengan karakteristik sosial dan geografis wilayah Nusa Tenggara Timur. Penelitian oleh Dilapanga dan Agustini menekankan bahwa wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan dan infrastruktur memerlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan kontekstual.²² Temuan penelitian ini mendukung hasil lapangan yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa formal dan istilah teknis sering tidak dipahami masyarakat. Kondisi geografis yang tersebar turut membatasi intensitas dan jangkauan sosialisasi BP3MI. Faktor-faktor tersebut memperkuat dominasi noise sebagaimana dijelaskan dalam Model Shannon–Weaver.

Penelitian lain menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi komunikasi perlindungan PMI. Deliana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kerja sama antara BP3MI, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pesan yang disampaikan.²³ Hasil

Migran Indonesia,” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik* 2, no. 4 (2025): 1089–1101, <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/article/view/2634>.

²¹ Kaha, Stephanie Perdana Ayu Lawalu, dan Rian Petrus Pati Matta, “Strategi BP3MI dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Provinsi NTT.”

²² Mulia Sarlita Dilapanga dan Prima Mulyasari Agustini, “Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Reputasi Layanan Unggul (Studi Kasus di BP3MI DKI Jakarta),” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (2025): 13057–13067, <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/9530>.

²³ Fika Deliana, “The Role of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (BP3MI) in Gender-Responsive Protection in Cilacap in 2024,” *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 4, no. 3 (2025): 1–13, <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/LITERACY/article/view/2690>.

penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi memang telah dilakukan, tetapi belum dimaksimalkan sebagai sarana penyederhanaan pesan dan penguatan makna. Pesan institusional sering kali kalah oleh informasi informal dari calo atau jaringan nonresmi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya difungsikan sebagai strategi komunikasi berbasis komunitas.

Aspek komunikasi dua arah juga menjadi perhatian penting dalam berbagai penelitian komunikasi publik. Studi Nada, Haerah, dan Ningtiyas menegaskan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif mensyaratkan adanya dialog aktif dan ruang partisipasi masyarakat sebagai penerima pesan.²⁴ Temuan ini relevan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme feedback pada kegiatan orientasi pra-pemberangkatan masih terbatas. Respons masyarakat belum dimanfaatkan secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas pesan. Hal ini menyebabkan proses komunikasi berjalan linier tanpa perbaikan berkelanjutan.

Perkembangan komunikasi digital juga menjadi isu penting dalam literatur komunikasi lembaga publik. Penelitian yang dilakukan oleh Firjatullah, Astuti, dan Hamdani menegaskan bahwa pemanfaatan media digital mampu memperluas jangkauan pesan kebijakan sekaligus membuka ruang dialog interaktif dengan masyarakat.²⁵ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BP3MI masih lebih mengandalkan komunikasi tatap muka konvensional. Padahal, penggunaan media digital berpotensi mengurangi hambatan geografis dan memperkuat mekanisme umpan balik. Kesenjangan antara potensi teknologi dan praktik komunikasi menjadi catatan penting penelitian ini.

Penelitian mengenai pelayanan publik keimigrasian juga memberikan perspektif relevan terkait komunikasi kebijakan migrasi. Studi Aji, Ryanindityo, dan Juliano menjelaskan bahwa kegagalan komunikasi sering kali berkontribusi pada meningkatnya migrasi nonprosedural.²⁶ Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur legal masih menjadi persoalan utama. Informasi

²⁴ Nadia Qonita Kama Nada, Kahar Haerah, dan Binaridha Kusuma Ningtiyas, "Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Jember," *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2024): 84–89, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/1243>.

²⁵ Hafiz Firjatullah, Vivien Febri Astuti, dan Tasya Camila Hamdani, "Analisis Peran Strategi Komunikasi oleh Pelayanan PPID Kementerian Luar Negeri RI dalam Mendiseminasi Informasi Publik," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 52–61, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/9844>.

²⁶ Koesmoyo Ponco Aji, Mochammad Ryanindityo, dan Wildan Hariz Juliano, "Communication Strategies in Preventing Non-Procedural Indonesian Migrant Workers Study Example at Surabaya Immigration Office," *Journal of Administration and International Development* 3, no. 1 (2023): 61–75, <https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/294>.

yang tidak dipahami dengan baik membuka ruang bagi disinformasi. Hal ini menegaskan pentingnya penyederhanaan pesan kebijakan oleh BP3MI.

Aspek perlindungan hukum PMI juga banyak dibahas dalam literatur administrasi publik. Penelitian Supriyanto dan Hartawan menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hak hukum PMI berakar pada komunikasi kebijakan yang kurang sistematis dan berkelanjutan.²⁷ Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan lapangan bahwa sosialisasi BP3MI belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pesan perlindungan hukum sering kali dipahami secara parsial. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara regulasi dan pemahaman publik.

Dimensi hubungan internasional juga menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting perlindungan PMI. Penelitian Junaidi dan Khikmah menegaskan bahwa perlindungan PMI tidak hanya bergantung pada kebijakan luar negeri, tetapi juga pada kesiapan informasi sebelum keberangkatan.²⁸ Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa orientasi pra-pemberangkatan memiliki posisi strategis. Namun, tanpa komunikasi yang efektif, tujuan perlindungan tidak tercapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kualitas komunikasi domestik sebelum migrasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi BP3MI telah berjalan sesuai mandat kelembagaan, tetapi masih menghadapi kesenjangan antara teori komunikasi publik dan praktik di lapangan. Literatur ilmiah secara konsisten menegaskan pentingnya komunikasi dua arah, kontekstual, dan partisipatif sebagai prasyarat efektivitas kebijakan publik. Temuan penelitian ini mengisi kekosongan kajian dengan menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada keterbatasan adaptasi pesan dan mekanisme umpan balik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian komunikasi perlindungan pekerja migran di Indonesia, khususnya pada konteks daerah pengirim PMI seperti Nusa Tenggara Timur.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur telah

²⁷ Hery Supriyanto dan Wisnu Hartawan, "Menuju Perlindungan Sinergis: Diagnosis Kesenjangan Tata Kelola Kolaboratif bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah," *JPPOL: Journal of Politics and Policy* 7, no. 1 (2025): 40–59, <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/243>.

²⁸ Muhammad Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8127>.

berjalan sesuai mandat kelembagaan dan mencakup berbagai bentuk kegiatan sosialisasi, orientasi pra-pemberangkatan, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan pengetahuan awal masyarakat mengenai prosedur migrasi legal dan risiko migrasi nonprosedural, meskipun peningkatan pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata pada seluruh lapisan masyarakat sasaran. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan pendidikan, serta kondisi geografis wilayah menjadi faktor utama yang menghambat penerimaan pesan secara optimal. Temuan ini menjawab permasalahan penelitian bahwa efektivitas komunikasi BP3MI masih menghadapi tantangan struktural dan sosial yang kompleks.

Analisis menggunakan Model Komunikasi Shannon–Weaver memperlihatkan bahwa proses komunikasi antara BP3MI sebagai sumber pesan dan masyarakat calon PMI sebagai penerima masih didominasi oleh pola satu arah. Pesan yang disampaikan relatif lengkap secara substansi, namun keberadaan noise berupa bahasa teknis, perbedaan latar belakang sosial, serta akses informasi yang terbatas menyebabkan pesan tidak selalu dipahami secara utuh. Mekanisme umpan balik yang belum berjalan optimal membuat institusi kesulitan menyesuaikan pesan dengan kebutuhan dan kapasitas pemahaman masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian kedua dengan menunjukkan bahwa model komunikasi dua arah belum terimplementasi secara maksimal pada praktik komunikasi perlindungan PMI di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia memerlukan penguatan strategi komunikasi yang lebih dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Penyederhanaan bahasa pesan, pemanfaatan media komunikasi yang lebih adaptif terhadap budaya lokal, serta optimalisasi peran tokoh masyarakat dan jaringan komunitas menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Perbaikan mekanisme umpan balik juga diperlukan agar institusi mampu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi komunikasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi pengembangan strategi komunikasi perlindungan pekerja migran yang lebih responsif, berorientasi pada pemberdayaan, dan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat daerah pengirim PMI.

REFERENSI

Aji, Koesmoyo Ponco, Mochammad Ryanindityo, dan Wildan Hariz Juliano.
“Communication Strategies in Preventing Non-Procedural Indonesian Migrant

- Workers Study Example at Surabaya Immigration Office.” *Journal of Administration and International Development* 3, no. 1 (2023): 61–75. <https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/294>.
- Bataona, Yoseph Boli. “BP3MI NTT Memperkuat Kolaborasi Cegah Pekerja Migran Ilegal.” *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*. Last modified 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5312113/bp3mi-ntt-memperkuat-kolaborasi-cegah-pekerja-migran-ilegal>.
- . “BP3MI NTT Minta Calon Pekerja Migran Berangkat secara Prosedural.” *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*. Last modified 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5208033/bp3mi-ntt-minta-calon-pekerja-migran-berangkat-secara-prosedural>.
- Bere, Sigiranus Marutho, dan Glori K. Wadrianto. “2024, Ada 122 Pekerja Migran Asal NTT Meninggal di Luar Negeri.” *Kompas.com*. Last modified 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/12/16/223325878/2024-ada-122-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri>.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Deliana, Fika. “The Role of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (BP3MI) in Gender-Responsive Protection in Cilacap in 2024.” *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 4, no. 3 (2025): 1–13. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/LITERACY/article/view/2690>.
- Dilapanga, Mulia Sarlita, dan Prima Mulyasari Agustini. “Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Reputasi Layanan Unggul (Studi Kasus di BP3MI DKI Jakarta).” *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (2025): 13057–13067. <https://jiip.stkipyapisdompui.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/9530>.
- Djatkika, Bahtiar Mohamad, Riyadi Santosa, dan Agus Hari Wibowo. “Intercultural Communicative Competence among Indonesian Migrant Workers in Malaysia: a Qualitative Exploration.” *Frontiers in Sociology* 9, no. 3 (2024): 1–14. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11004264/>.
- Firjatullah, Hafiz, Vivien Febri Astuti, dan Tasya Camila Hamdani. “Analisis Peran Strategi Komunikasi oleh Pelayanan PPID Kementerian Luar Negeri RI dalam Mendiseminasi Informasi Publik.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 52–61. <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/9844>.
- Hamdi, Imam. “49 migrant workers from NTT return deceased between January and April 2025.” *APSN: Asia Pacific Solidarity Network*. Last modified 2025. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-04-28/49-migrant-workers-ntt-return-deceased-between-january-and-april-2025.html>.
- Hapiipi, Muhamad. “Optimalisasi Humas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Human Trafficking.” *JRMK: Jurnal Riset Manajemen Komunikasi* 5, no. 1 (2025): 37–46. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRMK/article/view/5890>.
- Humas/BP3MI NTT. “KP2MI dan BP3MI NTT Perkuat Peran Bursa Kerja Khusus Lewat Sosialisasi di Kupang.” *Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan*

- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Last modified 2025. <https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/kp2mi-dan-bp3mi-ntt-perkuat-peran-bursa-kerja-khusus-lewat-sosialisasi-di-kupang>.
- Humas. “Berangkat Ilegal Melalui Jalur Laut, KemenP2MI Selamatkan 155 Calon Pekerja Migran Indonesia di Nunukan.” *Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Last modified 2025. <https://www.kp2mi.go.id/berita-detail/berangkat-ilegal-melalui-jalur-laut-kemenp2mi-selamatkan-155-calon-pekerja-migran-indonesia-di-nunukan>.
- Junaidi, Muhammad, dan Khikmah. “Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/8127>.
- Kaha, Hendrikus Likusina, Stephanie Perdana Ayu Lawalu, dan Rian Petrus Pati Matta. “Strategi BP3MI dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Provinsi NTT.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 3 (2025): 285–304. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/20127>.
- Keke, Yulianti, Siska Amonalisa Silalahi, Veronica, Furniawan, Euis Ajizah, Maesaroh, Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya, Muhammad Mudzakkir, dan Asdi. “Effective Communications for Indonesian Migrant Workers in Malaysia.” *IJCCH: International Journal of Community Care of Humanity* 2, no. 4 (2024): 431–438. <https://journal.lsmsharing.com/index.php/ijcch/article/view/173>.
- Mangara, Togi Haidat, Wadi Saputri, dan Rahmi Aulia Putri. “The Effect of Social, Economic, and Employment Conditions on Overseas Migration in Indonesia.” *Benefits: Journal of Economics and Tourism* 1, no. 1 (2024): 16–32. <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Benefits-JET/article/view/9>.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. UK: SAGE Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nada, Nadia Qonita Kama, Kahar Haerah, dan Binaridha Kusuma Ningtiyas. “Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Jember.” *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2024): 84–89. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/1243>.
- Narendra, Delvian, Resti Melani, Shifa Aishahila, Yulia Hanoselina, dan Rahmadhona Fitri. “Pemberdayaan Pekerja Migran: Peran BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik* 2, no. 4 (2025): 1089–1101. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/2634>.
- Primayanti. “Indonesia Expands Measures to Protect Migrant Workers Abroad.” *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*. Last modified 2025. <https://en.antaranews.com/news/395710/indonesia-expands-measures-to-protect-migrant-workers-abroad>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Supriyanto, Hery, dan Wisnu Hartawan. “Menuju Perlindungan Sinergis: Diagnosis Kesenjangan Tata Kelola Kolaboratif bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa

- Tengah.” *JPPOL: Journal of Politics and Policy* 7, no. 1 (2025): 40–59.
<https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/243>.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Edisi 2. Surakarta: Univ. Sebelas Maret, 2006.
- Syahputra, Romi, dan Syukur Kholil. “Application of the Shannon and Weaver Model to Reduce Message Distortion in Securing the 2024 Deli Serdang Election.” *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 2126–2136.
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/4593>.